

SURVEY INVESTASI DI JAWA TIMUR : IKLIM, MODEL PELAYANAN DAN FASILITAS YANG KONDUSIF BAGI DUNIA USAHA

Andri Wijanarko

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi Unijoyo

ABSTRAKSI

Pembangunan merupakan satu proses yang memakan waktu dan membutuhkan sumber daya. Proses tersebut membutuhkan waktu karena untuk mewujudkan suatu tujuan pasti membutuhkan koordinasi antar berbagai pihak / instansi. Pembangunan juga membutuhkan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya berupa dana pembangunan.

Melalui kajian ini faktor penentu utama pembangunan, yaitu tingkat investasi, ditelaah melalui studi lapangan dengan mengambil sampel lima daerah kota/kabupaten di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi hasil riset menurut daerah yang kesemuanya terjadi karena situasi, kondisi dan latar belakang daerah yang berbeda-beda pula.

Kata Kunci : iklim investasi, model pelayanan, fasilitas investasi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia jika dibandingkan dengan China, Vietnam dan Malaysia ternyata tidak terlalu mengembirakan mengingat pada saat yang sama, yaitu pada tahun 2003, pertumbuhan ekonomi China sebesar 9,1 persen, Vietnam sebesar 7,3 persen, Malaysia sebesar 5,2 persen, sedangkan Indonesia hanya mencapai 4,1 persen. Padahal Dumairy (1997:42) menjelaskan bahwa Secara spesifik apabila diukur berdasarkan angka-angka PDB, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang periode 25 tahun era pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJPT I) tergolong tinggi. Apabila dihitung berdasarkan angka-angka PDB menurut harga konstan, perekonomian Indonesia tumbuh dengan laju rata-rata per tahun 8,56 persen selama pembangunan lima tahun (Pelita) I, Pelita II sebesar 6,96 persen, Pelita III sebesar 6,24 persen, Pelita IV sebesar 5,32 persen dan sekitar 7 persen selama Pelita V. Ini berarti, sepanjang kurun pembangunan jangka panjang tahap pertama ekonomi Indonesia tumbuh dengan laju rata-rata 6,82 persen per tahun. Bertolak dari angka-angka pertumbuhan yang tinggi inilah *World Bank* menilai prestasi pembangunan Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di jajaran negara-negara sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini pulalah yang pada tahun 1993 mengantarkan

Indonesia (menurut majalah *Time*) menjadi "macan" ekonomi baru di Asia.

Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur, produk domestik regional bruto (PDRB) mulai tahun 2000 - 2004 tercatat selalu mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, sektor industri pengolahan memiliki peranan dominan dibanding dengan sektor yang lain, berturut-turut sejak tahun 2000-2004 sektor ini memiliki kontribusi 27 persen; 26,5 persen; 25,2 persen; 24,9 persen dan 24,7 persen.

Investasi disekapati menjadi kata kunci dalam setiap pembicaraan konsep ekonomi di negara ini. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi pada posisi ujung tombak.

Tahun 2003 dan 2004 pemerintah Indonesia mencanangkan "Tahun Investasi" dengan tujuan meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan di Indonesia, namun sejak tahun 1997 nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) terus merosot sejak posisi puncak tersebut. Tahun 2003 PMDN tinggal senilai Rp 50 triliun dengan 196 proyek. Pada November 2004, tercatat nilai PMDN terus merosot hingga tinggal Rp 33,4 triliun dengan 158 proyek. Pola yang sama juga terjadi pada penanaman modal dalam asing (PMA). Tahun 1997 PMA tercatat sebesar US\$ 33 miliar dengan 778 proyek. Tahun 2003 anjlok menjadi US\$ 14 miliar dengan 1.170 proyek. Irosnisnya, hingga November 2004 nilai PMA baru mencapai US\$ 9,6 miliar dengan 1.066 proyek (Kompas:5 Februari 2005).

Berdasarkan data tersebut dan dengan membandingkan dengan tahun 2003, maka pada bulan Agustus 2004 seharusnya realisasi PMA di Jawa Timur mencapai 45 proyek senilai US\$ 304,44 juta, sedangkan realisasi PMA pada Agustus 2004 baru mencapai 29 proyek (43 persen dari tahun 2003) senilai US\$ 48,5 juta (11 persen dari tahun 2003).

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan realitas sebagaimana di atas, kajian ini dikerjakan untuk menjawab permasalahan pokok penelitian :

1. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh pada keputusan melakukan investasi di suatu wilayah ?
2. Model pelayanan dan fasilitas investasi seperti apakah yang kondusif bagi dunia usaha ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Menggali informasi tentang faktor-faktor yang pada keputusan melakukan investasi di suatu wilayah.
2. Menentukan model pelayanan dan fasilitas investasi seperti apakah yang kondusif bagi dunia usaha.

Keluaran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keluaran berupa:

1. Informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan melakukan investasi disuatu wilayah.
2. Bentuk model pelayanan dan fasilitas investasi yang kondusif bagi dunia usaha.
3. Tersusunnya rekomendasi pengembangan peningkatan iklim investasi, bentuk model pelayanan perijinan dan fasilitas pendukungnya.

Sasaran

1. Peningkatan iklim investasi dalam suatu wilayah.
2. Peningkatan kulaitas model pelayanan dan fasilitas pendukung perijinan.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (Marzuki, 1997:55), dalam hal ini diperoleh dari responden yang menjawab pertanyaan dengan mengirim angket atau mendatangi responden serta melakukan wawancara terstruktur.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian (Marzuki, 1997:56) berasal dari dokumen institusional, buku-buku ilmiah, majalah, atau artikel yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti sebagai landasan dan teori.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan pewawancara untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Questionare

Yaitu suatu media dimana peneliti menyusun daftar pertanyaan secara tertulis yang kemudian dibagikan kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

3. Observasi

Yaitu suatu metode dimana peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan yang ada untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan sasaran.

4. Studi kepustakaan
Yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku literatur serta bacaan lain yang mendukung penelitian ini.

Asumsi-asumsi yang diberlakukan terhadap responden untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden merupakan subyek yang mengetahui secara langsung maupun tidak langsung proses pelayanan perijinan di daerahnya.
2. Responden merupakan pelaku yang menjalankan jenis usahanya (perusahaannya).
3. Responden dianggap cukup mampu baik secara umum maupun secara pengetahuannya mengenai pelayanan perijinan.

Sedangkan distribusi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/kota	Jumlah sampel
1.	Kota Surabaya	51
2.	Kabupaten Sidoarjo	28
3.	Kabupaten Gresik	30
4.	Kabupaten Lamongan	29
5	Kabupaten Pasuruan	30
	Jumlah	168

Sasaran Penelitian / Lokasi Kajian

Penelitian ini mempunyai saran lima kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Lamongan, Gresik, Sidoarjo dan Pasuruan.

Metode Analisis

Didalam penelitian ini digunakan dua analisis yaitu analisis yang bersifat deskriptif yaitu penjabaran hasil penelitian dan analisis yang bersifat eksploratif dari data responden yang lebih mendalam dalam bentuk tabulasi silang.

DESKRIPSI HASIL SURVEY

Iklim Investasi Daerah

Kondisi sosial masyarakat di lingkungan tempat usaha, secara umum bila dilihat dari tingkat kondusifitas ataupun kualitas beberapa variabel yang digunakan masih perlu kerja keras dari semua pihak agar Jawa Timur bisa menjadi daerah yang lebih menarik sebagai tempat berinvestasi. Terutama terkait dengan faktor ketenagakerjaan, ketersediaan lembaga keuangan serta rendahnya daya beli masyarakat di daerah.

Peningkatan SDM harus menjadi perhatian serius bila ingin menjadikan Jawa Timur lebih kondusif dan menarik sebagai tempat berinvestasi, hal ini karena hampir lebih dari 50% responden menyatakan bahwa kualitas dan produktivitas tenaga kerja di daerah belum tinggi.

Pungutan Liar

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada lima kota, yaitu Kotamadya Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Lamongan dan Kab. Pasuruan, ternyata mayoritas responden menyatakan bahwa lembaga peradilan dan lembaga birokrasi melakukan pungli, dan hampir dari setengah atau 44,6% dari responden menyatakan bahwa pungli oleh kedua lembaga ini secara nominal relatif tinggi atau cukup besar.

Disisi lain ditemukan suatu paradox dimana justru preman yang selama ini identik dengan dunia kriminal khususnya pemerasan, ternyata merupakan pelaku pungli paling kecil yaitu sebesar 12,5%. Penelitian ini telah menunjukan bahwa saat ini institusi dan lembaga resmi negara serta organisasi legal merupakan pelaku terbesar pungli bagi dunia usaha.

Keamanan

Berikut ini adalah pandangan secara umum responden terhadap masalah keamanan di lima kota yaitu Kotamadya Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Lamongan dan Kab. Pasuruan. Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden (58% responden) menyatakan bahwa berbagai gangguan keamanan masih terjadi di daerah terkait dengan usaha yang mereka jalankan. Oleh karena itu aparat keamanan harus memberi perhatian khusus terhadap hal ini.

Infrastruktur Wilayah

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kondisi infrastruktur wilayah yang terkait dengan realisasi fungsi publik pemerintah. Infrastruktur tersebut meliputi sarana transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara. Demikian juga dengan fungsi utilitas wilayah yang meliputi fasilitas listrik, air, telekomunikasi dan kawasan industri terpadu. Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana maupun kualitas dari infrastruktur diatas perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini juga akan berimplikasi terhadap kelancaran pelayanan investasi yang akan masuk ke daerah khususnya di wilayah Jawa Timur.

Model dan evaluasi terhadap Pelayanan Satu Atap

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya bahwa Pemerintah Kota/kabupaten yang membentuk institusi yang pelayanan satu atap adalah kota Sidoarjo dan Pasuruan. Hasil tanggapan responden dari kedua kota tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penelitian ini memberi gambaran bahwa model satu atap yang telah dilakukan oleh kota Sidoarjo dan Pasuruan mendapat respon yang positif oleh para penggunanya. Hal ini didasari dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan satu atap yang telah dilakukan cukup memberikan kepuasan, khususnya mengenai pemberian informasi yang diperlukan dan proses pelayanan yang dilakukan petugas dinilai sudah cukup baik..

Tingkat transparansi terhadap tarif perijinan ijin infestasi, mayoritas responden menyatakan bahwa transparansi baik, hal ini mengindikasikan meskipun tidak terdapat responden yang menyatakan bahwa tranparansi tarif jelek, tetapi terdapat masalah terhadap sosialisasi tarif resmi.

Hasil survey terhadap responden bahwa pelaksanaan model pengurusan satu atap di Kota sidoarjo merupakan harapan dari responden mayoritas responden 100%. Bahwa dengan adanya model satu atap ini 36% responden yakin akan mengurangi pungli, 33,3% tidak dan 10% ragu-ragu. Selain itu dengan adanya model satu atap yang dilaksanakan 10% responden berharap proses lebih cepat, 53,3% prosedur lebih sederhana, 16,7% prosedur lebih transparan prosedurnya, dan 20% transparan dalam biaya. Tanggapan responden bahwa "tidak masalah biaya perijinan asal ada kepastian hukum, selesai dengan cepat dan dilaksanakan dengan transparan" 93% setuju dan 6,7% tidak

Berdasarkan hasil survey terhadap responden bahwa pelaksanaan model pengurusan satu Atap di Kota sidoarjo daan Pasuruan merupakan harapan dari mayoritas responden, bahwa dengan adanya model satu atap ini 53,6% responden yakin akan mengurangi pungli, 25% tidak dan 21% ragu-ragu. Selain itu dengan adanya model satu atap yang dilaksanakan 10,7% responden berharap proses lebih cepat, 17,9% prosedur lebih sederhana, 25% prosedur lebih transparan prosedurnya, dan 46,4% tranaparan dalam biaya. Tanggapan responden bahwa "tidak masalah biaya perijinan asal ada kepastian hukum, selesai dengan cepat dan dilaksanakan dengan transparan" 96,4% setuju dan 3,6% tidak setuju.

Model dan evaluasi terhadap Pelayanan Bukan Satu Atap

Pemerintah Kota/kabupaten yang membentuk institusi yang pelayanan bukan satu atap adalah kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan lamongan. Hasil tanggapan responden dari tiga kabupaten/kota tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penilaian responden terhadap pelayanan merupakan salah satu indikator yang harus diketahui dan dievaluasi dari waktu ke waktu. Hal ini cukup penting mengingat dari kepuasan konsumenlah tingkat pelayanan suatu institusi diketahui. Suatu institusi dapat menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pelayanan prima bilamana kepuasan konsumen telah dapat diwujudkan dengan baik.

Ada beberapa usulan yang ditanyakan kepada responden, dan berikut hasil yang diperoleh adalah hampir 100% responden menginginkan perubahan pola kelembagaan yaitu dari banyak atap berubah menjadi satu atap. Dari tiga kabupaten/kota, respon menuju perubahan ke one stop service menguat setelah dibuktikan dengan perubahan yang diharapkan pada implikasi pelayanan tersebut yaitu sebagian besar responden menyatakan bahwa model satu atap akan lebih memastikan transparansi tarif/biaya yang dibebankan masyarakat dalam melakukan proses perijinannya. Harapan lainnya yaitu responden beranggapan dengan model satu atap akan lebih menyederhanakan prosedur pelayanan serta proses pelayanan yang dilakukan lebih cepat. Harapan ini tidaklah berlebihan karena memang dalam prakteknya pelayanan yang melalui banyak meja menimbulkan biaya tinggi dan dengan prosedur yang berbelit-belit. Ini tentu saja bukan tidak mungkin dilakukan mengingat responden menginginkan perubahan mengenai model pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah masing-masing.

Selain model yang terintegrasi dalam satu atap, mutu dari pelayanannya juga harus ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi dan kejelasan tarif.

Fasilitas Investasi

Kebutuhan fasilitas investasi berupa infrastruktur jalan masih perlu ditingkatkan sebab 55% responden menyatakan bahwa kualitas jalan masih kurang baik dan 50% responden merasa fasilitas jalan bagi keperluan dunia usaha masih kurang. Transportasi laut sudah cukup baik sebab hanya 35% responden masih merasa kurang memadai dan 40% responden menyatakan kondisi pelabuhan masih kurang baik. Responden sebanyak 70% menyatakan kondisi transportasi udara sudah memadai, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dunia usaha terhadap transportasi udara cukup tinggi. Kebutuhan jasa pengiriman terhadap dunia sangat penting dalam suatu wilayah, berdasarkan hasil penelitian ternyata 58,35% responden menyatakan memadai dan jasa angkutan barang mayoritas responden menyatakan baik.

Kualitas ketersediaan listrik dan sarana telekomunikasi merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting bagi investor, fasilitas listrik yang tersedia dinilai responden memadai (58,9%) dengan yang menyatakan kondisi baik sebanyak 52,4%. Sarana telekomunikasi 77% responden menyatakan memadai dan 45% baik. Hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah masalah ketersediaan air bersih sebab seporo responden menyatakan bahwa ketersediaan air bersih kurang memadai atau tidak memadai, dan kualitasnya masih kurang baik.

Kualitas dan ketersediaan kawasan industri, menurut responden masih perlu perbaikan dan penyempurnaan, sebab meskipun lebih dari

setengah responden menyatakan bahwa ketersediaan kualitas kawasan industri sudah memadai dan baik, tetapi terdapat 30-40% responden merasa kualitas dan ketersediaan kawasan industri perlu ditingkatkan. Kawasan industri merupakan kawasan yang sangat penting sebab investasi dalam pengertian investasi secara langsung atau *foreign direct investment* membutuhkan lokasi untuk melakukan investasi yang permanen dalam jangka waktu yang cukup lama.

Kebutuhan atas sarana dan prasarana pengolahan dan pembuangan limbah perlu mendapat perhatian serius, sebab 50% responden menyatakan kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pembuangan limbah kurang/tidak memadai. Pengolahan dan ketersediaan lokasi pembuangan limbah merupakan salah satu fasilitas investasi yang sangat penting mengingat dampak yang ditimbulkan, yaitu baik ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan itu sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan dan aspirasi dari responden yang dikumpulkan dalam survey tersebut, maka dirasa perlu melakukan langkah-langkah berikut :

1. Peningkatan kondisi yang kondusif dalam suatu wilayah dan kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam usaha untuk peningkatan suatu iklim usaha yang sehat dan dinamis. Oleh sebab itu pihak-pihak yang terkait dengan faktor-faktor peningkatan investasi dalam wilayah diharapkan kontribusinya meliputi penghentian tindakan pungutan liar, peningkatan keamanan dan pengembangan dan peningkatan infra struktur sebagai daya tarik investasi dalam suatu wilayah.
2. Peningkatan fungsi dari lembaga investasi Propinsi Jawa Timur sebagai pusat informasi potensi investasi dan teknis pengajuan perijinan bagi setiap pemerintah Kota/Kabupaten diwilayah Jawa Timur, tetapi fungsi ini tidak akan berhasil tanpa kontribusi dari setiap daerah.
3. Perijinan merupakan pintu gerbang pertama masuknya arus investasi ke dalam suatu wilayah, sehingga informasi dan pelayanan yang diberikan kepada calon investor harus jelas dan akurat. Berkaitan dengan hal tersebut, seyogyanya dibentuk suatu *Task Force* yang bertugas mengkoordinir instansi terkait untuk dapat berkumpul menjadi satu dalam satu tempat yang dapat dengan mudah dijangkau oleh calon investor. Secara teknis, penyusunan *Task Force* menyesuaikan kondisi masing-masing kota/kabupaten.
4. Tarif perijinan merupakan satu masalah yang banyak mendapat sorotan dari pengguna layanan perijinan. Seyogyanya besaran

tarif dan prosedur pembayaran dapat dipublikasikan secara jelas kepada masyarakat. Beberapa teknis yang dapat dilakukan adalah dengan memasang pengumuman pada tempat strategis; menyediakan tenaga *Customer Service* yang siap melayani pengguna jasa dan menyediakan *hotline service* bagi masyarakat yang membutuhkan informasi melalui fasilitas telepon.

5. Peningkatan fasilitas transportasi darat yaitu berupa perbaikan kualitas jalan dan ketersediaan jalan. Pengembangan dan pembukaan kawasan industri baru dengan fasilitas yang cukup memadai. Dalam bidang permasalahan penanganan limbah perlu dikembangkan suatu perturan yang mampu mengakomodasi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penanganan limbah agar permasalahan dan dampak dari limbah bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta, BPFE.
- Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur, *Data Perkembangan Proyek PMA dan PMDN di Jawa Timur*, Surabaya, Agustus 2004.
- BAPPEPROP Jawa Timur, *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2000 - 2004*, Surabaya, 2004
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta, BPFE, 1992.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 1997.
- Jhingan, ML, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1992.
- Lerner, Abba P. *Economics of Employment*, New York, McGraw Hill, 1951.
- Lincolinn, Ivonna & Egon Guba, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills, 1985.
- Mangkusubroto, Guritno, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta, 1993.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya, 1990.
- Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave, *Public Economics*, 1984.
- Regional Economic Development Institute (REDI), *Survei Persepsi Perilaku Usaha Tentang Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Iklim Usaha di Daerah (Studi 23 Kabupaten/Kota di Indonesia)*, 2003.
- Basyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta, Rajawali Pers, 1996.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta, LP FEUI, 1985.
- Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000
- Todaro, Michael P., *Economic Development*, seventh edition, London, Addison Wesley Longman. 2000.